

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
SURABAYA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tertanggal 14 Desember 2022 perihal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 yang sudah tersusun ini menyajikan informasi yang disertai data mengenai pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bersumber dari unit pengolah data pada bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Informasi dan data yang tersaji merupakan kompilasi kegiatan yang juga melibatkan satuan kerja di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Yogyakarta, Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dengan diresmikan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 5 Desember 2022 dimana wilayah hukumnya meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, maka untuk tahun berikutnya tahun 2023 maka ketiga pengadilan tersebut sudah tidak menjadi bagian dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya selama Tahun 2022. Dan semoga kekurangan dari laporan ini menjadi koreksi bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Namun jika ada kelebihannya akan menjadikan semangat bagi kami untuk dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan untuk pelaksanaan kegiatan tahun-tahun mendatang.

Surabaya, 20 Januari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya



Dr. ISTIWIBOWO, SH.MH.
NIP. 19571011 198503 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Wilayah Hukum	iii
Bab I Pendahuluan	1
A. Kebijakan Umum Pengadilan	1
B. Visi dan Misi	3
C. Rencana Strategis (Renstra)	4
D. Indikator Kinerja Utama	8
Bab II Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	9
A. Keadaan Perkara di Peradilan Tata Usaha Negara	9
1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama.....	9
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding.....	9
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi.....	11
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali.....	12
B. Penyelesaian Perkara	12
1. Jumlah sisa perkara yang diputus	12
2. Jumlah perkara yang diputus tepat waktu.....	12
3. Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK.....	13
C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan)	13
Bab III Sumber Daya Manusia	14
A. Mutasi	17
B. Promosi	24
C. Pensiun	27
D. Dukungan Teknologi Informasi	28
Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi	34
A. Pengelolaan Keuangan	34
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana	36
C. Pengelolaan Teknologi Informasi	40
Bab V Peningkatan Pelayanan Publik	41
• Akreditasi Penjamin Mutu	41
• Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	41
• Inovasi Pelayanan Publik	42
Bab VI Pengawasan	43
A. Internal	43
B. Evaluasi	43
Bab VII Penutup	46
A. Kesimpulan	46
B. Rekomendasi	47

WILAYAH HUKUM PTTUN SURABAYA



GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
JL. KETINTANG MADYA VI NO. 2 SURABAYA



Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Meliputi Daerah Hukum Propinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur





BAB I

PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut pemerintah melalui aparatnya di bidang Tata Usaha Negara (TUN) diharuskan berperan positif aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Menyadari sepenuhnya peran positif aktif pemerintah dalam kehidupan masyarakat, maka pemerintah perlu mempersiapkan langkah menghadapi kemungkinan timbulnya perbenturan kepentingan, perselisihan, atau sengketa antara badan atau pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut dari segi hukum perlu dibentuk peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena pembentukan peradilan Tata Usaha Negara sebagai bagian pembangunan hukum nasional yang berwatak dan bersifat integral serta dilaksanakan berkesinambungan sebagaimana diamanatkan oleh Ketetapan MPR RI No. II / MPR / 1983 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dengan demikian peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang ditugasi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa di bidang Tata Usaha Negara.

Memang peradilan di bidang Tata Usaha Negara merupakan lembaga baru dalam tatanan hukum Indonesia dan pembentukannya memerlukan perencanaan serta persiapan yang sebaik-baiknya sehingga pelaksanaannya perlu dilakukan secara bertahap. Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikeluarkan pada tahun 1986 yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara baru bisa diterapkan 5 (lima) tahun kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Sebagai langkah awal pada tahun 1990 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang. Dilanjutkan pada tahun 1993 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Medan dan Ujung Pandang menyebutkan bahwa : “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, daerah hukumnya meliputi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung.

Sesuai ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa : “Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berkedudukan di Ibukota Propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi”. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara harus dibentuk dengan Undang-Undang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan terbentuknya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka beberapa wilayah propinsi yang semula termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yaitu Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dialihkan menjadi bagian dari daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Demikian pula halnya dengan beberapa wilayah propinsi yang semula termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang yaitu Propinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur dialihkan ke dalam daerah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak terlepas dari Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraannya. Reformasi sistem peradilan membawa perubahan mendasar bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, di bidang administrasi, organisasi, perencanaan dan keuangan. Reformasi Birokrasi pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek penataan kelembagaan (organisasi), penataan ketatalaksanaan (business process), penataan sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan public.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan bila timbul benturan kepentingan, perselisihan / sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat yang dapat merugikan atau menghambat jalannya pembangunan nasional yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dilaksanakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara tertinggi.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 11 Pebruari 1993 adalah merupakan Pengadilan Tingkat Banding.

Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1993, meliputi daerah propinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara Tata Usaha Negara yang dimintakan Pemeriksaan Banding oleh para pencari keadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu dari :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;

4. Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar;
5. Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
6. Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Disamping itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan :

- a. Sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah hukumnya, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai tingkat pertama dan terakhir;
- b. Sengketa yang telah melalui upaya administrative, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama (Pasal 48 jo. Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan tehnik yustisial bagi perkara banding;
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- c. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
- d. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya;
- e. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Tata Usaha dan Rumah Tangga, Keuangan dan Pelaporan, Kepegawaian dan TI, Rencana Program dan Anggaran);
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum Tata Usaha Negara, pelayanan riset / penelitian.

B. VISI DAN MISI

Adapun Visi Badan Peradilan (yang juga merupakan penegasan dan perwujudan kehendak atau cita-cita rakyat Indonesia di bidang pelaksanaan kekuasaan kehakiman) telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2014 – 2035 sebagai berikut :

Visi Badan Peradilan adalah : ***“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”***

Oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan bagian dari Badan Peradilan, maka visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengacu dan berpedoman pada visi Badan Peradilan tersebut, yaitu :

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya : ***“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung”***

Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui misi. Sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2014 – 2035, adapun Misi Badan Peradilan adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Agar Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat diwujudkan, maka diperlukan sasaran organisasi, yang merupakan tujuan organisasi yang agak lebih konkrit daripada visi dan misi. Dan agar supaya sasaran organisasi dapat diwujudkan, maka diperlukan adanya Rencana Strategi (Renstra).

Dalam menyusun Renstra, harus dianalisa keadaan eksternal dan internal organisasi, sehingga akan diperoleh gambaran terhadap peluang, tantangan / ancaman, kekuatan dan kelemahan organisasi / badan peradilan di dalam mewujudkan sasaran yang telah dikehendaki dan ditetapkan. Analisa ini dapat menggunakan tehnik-tehnik analisa yang ada dalam manajemen, misalnya SWOT maupun Gap analisa. Setelah memperoleh gambaran tentang peluang, tantangan / ancaman, kekuatan dan kelemahan organisasi yang menjadi potensi dan permasalahan, maka dapat disusun suatu rencana strategi, yang pada intinya adalah meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan organisasi, sehingga dengan demikian dapat mewujudkan peluang dan menghilangkan tantangan / ancaman organisasi di dalam mencapai sasaran / tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

Adapun potensi dan permasalahan yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenght) :

Kekuatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan, meliputi :

- a. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan voorpost (kawal depan) bagi Pengadilan Tata Usaha Negara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memiliki kekuasaan dan kewenangan mengadili perkara tata usaha negara di tingkat banding sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- c. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karier (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membawahi 6 (enam) Pengadilan Tata Usaha Negara.
- e. Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 177/KMA/SK/XII/2015 tentang Perubahan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 128/KMA/SK/VIII/2015 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

- f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya, dalam pelaksanaan tugas harus didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional kinerja.
2. Kelemahan (Weaknes) :
- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia
Terbatas/kurangnya Sumber Daya Manusia yang mempunyai standar kompetensi atau keahlian yang dibutuhkan, khususnya dalam hal penguasaan Teknologi Informasi.
Belum mempunyai kewenangan sendiri untuk merekrut pegawai sesuai kebutuhan yang diperlukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
Belum seluruhnya Pejabat Struktural dan pejabat Fungsional yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jenjang jabatannya.
- b. Manajemen dan Efisiensi dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana
Kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana pengadilan secara efisien belum memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan
- c. Aspek Proses Peradilan
Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
- d. Terbatasnya sarana pendukung Teknologi Informasi (IT)
Keterbatasan anggaran yang diberikan pemerintah mengakibatkan sulit terpenuhinya sarana pendukung IT. Karena terbatas sarana pendukung IT mengakibatkan kurang maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam proses peningkatan kinerja dalam pelayanan publik.
- e. Transparansi Peradilan
Transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.
- f. Fungsi Pengawasan
Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Namun dengan 12 kewajiban untuk mengawasi 6 Satker (Satuan Kerja) pada Badan Peradilan di bawah wilayah hukum yang berlokasi di daerah lain yang cukup jauh, maka beban yang harus diselesaikan menjadi sedemikian besar. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya juga mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan pengaduan di tingkat daerah. Hal ini disebabkan adanya keterbatasan SDM, anggaran, keahlian dan sebagainya. Tantangan lain yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimalkan fungsi pengawasan adalah meningkatkan kualitas hubungan kerjasama dengan KY sebagai lembaga pengawas eksternal.

3. Peluang (Opportunities) :

Restrukturisasi organisasi menjadi kebutuhan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan badan-badan peradilan di bawah wilayah hukumnya, adapun peluang-peluang yang dimiliki PTTUN Surabaya untuk mengembangkan organisasi, antara lain :

- a. Adanya website Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara;
- b. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- c. Adanya keinginan untuk menumbuhkan budaya organisasi yang baru: profesional dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- d. Adanya komitmen pimpinan terkait zona integritas diperlukan demi kelancaran dalam proses pelaksanaannya.
- e. Adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi yang modern dengan memanfaatkan TI.
- f. Adanya keinginan untuk menyederhanakan rantai birokrasi.

4. Tantangan dan Kendala Yang Dihadapi (Threats) :

a. Aspek Proses Peradilan

Belum tersedianya suatu alat/media yang dapat mengukur kepuasan pengguna jasa pengadilan sehingga belum dapat diketahui sejauhmana masyarakat pencari keadilan merasa puas dengan pelayanan yang telah diberikan kepada pencari keadilan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Pegawai Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya belum seluruhnya menguasai Teknologi Informasi yang berdampak pada penyelesaian tugas dan fungsi sehari-hari

c. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Terus bertambahnya jumlah perkara diupayakan penyelesaian penanganan perkara terutama permasalahan administrasi perkara banding lebih cepat sementara ketersediaan pegawai yang terbatas.

Terjadinya perubahan sistem administrasi perkara dari sistem administrasi yang dilakukan secara manual menjadi administrasi yang berbasis teknologi informasi.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Terbatasnya anggaran untuk sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan, termasuk untuk pembinaan dan pengawasan.

Dari potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka dirumuskanlah tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

1. Memudahkan publik dalam pengurusan birokrasi pengadilan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban para pihak, yang pada gilirannya akan mendorong persepsi positif kepada lembaga peradilan.

2. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan badan-badan peradilan di bawah wilayah hukumnya untuk menghadapi beban kerja di lapangan.
3. Penataan ulang proses manajemen perkara perlu dilakukan dengan paradigma *business process reengineering*, untuk menghindari belenggu prosedur formal tata penanganan perkara yang ada di masa lalu.
4. Menuju organisasi yang telah memiliki standar Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan tersebut diatas, maka diperlukan sasaran strategis yang menjadi program Pembaruan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Adapun sasaran strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase penurunan sisa perkara
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus
3. Peningkatan Kualitas SDM, dengan indikator kinerja :
 - Persentase Pembinaan ke daerah
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
 - b. Persentase Pengawasan ke daerah

Keempat sasaran strategis tersebut diatas menjadi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 2020 – 2024, yang dapat digambarkan dalam matriks di bawah ini :

Visi	:	Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung
Misi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	c. Persentase penurunan sisa perkara	80%	80%	80%	80%	80%
	d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi	80%	80%	80%	80%	80%

	- Peninjauan Kembali					
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan Kuaalitas SDM	a. Persentase Pembinaan ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%
Peningkatan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase Pengawasan ke daerah	100%	100%	100%	100%	100%

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tgl. 31 Januari 2022 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dapat digambarkan pada matriks di bawah ini :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
		c. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu

BAB II MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. KEADAAN PERKARA

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Keadaan Perkara tingkat pertama satuan kerja sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Sisa th 2021	Masuk	Putus	Cabut	Dissmisal	Sisa th 2022
1.	PTUN Surabaya	57	253	215	25	3	95
2.	PTUN Semarang	22	105	69	8	1	30
3.	PTUN Yogyakarta	2	20	11	-	-	2
4.	PTUN Denpasar	5	19	16	-	-	2
5.	PTUN Mataram	21	67	66	-	-	22
6.	PTUN Kupang	23	73	75	-	-	21
Jumlah		130	537	452	33	4	172

Penyelenggaraan Pemilu memiliki potensi menimbulkan setidaknya empat macam permasalahan yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, perselisihan administrasi pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dalam hal timbul sengketa administrasi pemilu maka instansi yang berwenang menyelesaikannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan dibataalkannya pasal 236 C Undang-Undang No. 12 Thn. 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 48 Thn. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penanganan sengketa Pilkada cukup dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama nya.

Selama tahun 2022, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak menerima permohonan penyelesaian sengketa Pilkada, sehingga tidak ada laporan yang dapat disajikan mengenai keadaan perkara tingkat pertama di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING

Keadaan Perkara tingkat banding satuan kerja sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Sisa th 2021	Masuk	Putus	Sisa th 2022
1.	PTUN Surabaya	14	93	86	21
2.	PTUN Semarang	7	42	38	11
3.	PTUN Yogyakarta	1	3	3	-
4.	PTUN Denpasar	2	11	12	1
5.	PTUN Mataram	4	23	26	1
6.	PTUN Kupang	10	39	30	26
Jumlah		38	211	195	60

Pada tahun 2022, perkara banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 196 Perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2021 yang belum diselesaikan sejumlah 0 Perkara, sehingga beban perkara yang harus diselesaikan di tahun 2022 adalah sejumlah 196 Perkara.

Dari keseluruhan perkara di tahun 2022 sejumlah 196 Perkara, telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 182 Perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2022 adalah sejumlah 14 Perkara.

Berikut dapat digambarkan keadaan perkara tingkat banding di tahun 2022 dalam matriks tabel dan diagram di bawah ini :

No.	Klasifikasi	Sisa di Th. 2021	Masuk di Th. 2022	Jumlah Beban	Putus di Th. 2022	Cabut	Sisa di Th. 2022
1	Pertanahan	-	83	83	75	-	8
2	Kepegawaian	-	7	7	7	-	-
3	Perijinan	-	5	5	5	-	-
4	Tender	-	4	4	4	-	-
5	Lelang	-	5	5	5	-	-
6	Kepala Desa & Perangkat Desa	-	2	2	-	-	2
7	Lingkungan Hidup	-	2	2	2	-	-
8	Tindakan faktual administrasi pemerintah	-	2	2	-	-	2
8	Lain Lain	-	86	86	84	-	2
	Jumlah	-	196	196	182	-	14



Dari keseluruhan jenis perkara yang masuk pada tahun 2022 tersebut diatas, diajukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara pengaju di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana digambarkan dalam matriks tabel di bawah ini :

No.	Pengadilan Pengaju	Jumlah Perkara
1.	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	87 perkara
2.	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	38 perkara
3.	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	5 perkara
4.	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	11 perkara
5.	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	24 perkara
6.	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	31 perkara
	J u m l a h	196 perkara
Keterangan :		

3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI

Keadaan Perkara tingkat Kasasi satuan kerja sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Sisa th 2021	Masuk	Putus	Sisa th 2022
1.	PTUN Surabaya	27	44	51	20
2.	PTUN Semarang	9	12	16	5
3.	PTUN Yogyakarta	-	1	1	-
4.	PTUN Denpasar	5	10	9	6
5.	PTUN Mataram	1	9	3	5
6.	PTUN Kupang	8	19	20	10
	Jumlah	50	95	100	46

Untuk permohonan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yang diterima di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan untuk diselesaikan di tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung RI di tahun 2022 ini, adalah sebagai berikut :

a. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama :

Di tahun 2022 ini tidak ada perkara Pilkada yang diterima/diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya otomatis tidak ada pengajuan Kasasi.

b. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding :

Dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk penyelesaian perkara di wilayah hukumnya, di dapat data perkara yang mengajukan Kasasi adalah sejumlah 0 perkara.

4. KEADAAN PERKARA TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

Keadaan Perkara tingkat Peninjauan Kembali satuan kerja sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai berikut :

No.	Satuan Kerja	Sisa th 2021	Masuk	Putus	Sisa th 2022
1.	PTUN Surabaya	15	32	30	17
2.	PTUN Semarang	4	13	9	8
3.	PTUN Yogyakarta	-	-	-	-
4.	PTUN Denpasar	2	5	5	2
5.	PTUN Mataram	3	4	4	3
6.	PTUN Kupang	3	8	4	4
Jumlah		27	62	52	34

Untuk permohonan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yang diterima di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan untuk diselesaikan di Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI di tahun 2022 ini, adalah sebagai berikut :

c. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama :

Di tahun 2022 ini tidak ada perkara Pilkada yang diterima/diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya otomatis tidak ada pengajuan Peninjauan Kembali.

d. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding :

Dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk penyelesaian perkara di wilayah hukumnya, di dapat data perkara yang mengajukan Peninjauan Kembali adalah sejumlah 0 perkara.

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sebagaimana telah diuraikan diatas dari keseluruhan perkara di tahun 2022 sejumlah 196 Perkara (termasuk sisa perkara tahun lalu), telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 182 Perkara, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2022 adalah sejumlah 14 Perkara.

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Dari keseluruhan perkara yang diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Tahun 2022, telah diselesaikan dan diputus tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	Wilayah Pengadilan Tinggi	Renggang Waktu Memutus				Ket.
		1 - 3 Bulan	3 - 6 Bulan	6 - 12 Bulan	> 12 Bulan	
1	PT. TUN. Surabaya sebagai Tingkat Banding	√	-	-	-	Perkara yang diputus sejumlah 196 Perkara

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PK

Dari keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Tingkat Banding dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut :

- Perkara yang diputus di tingkat banding sejumlah 196 Perkara;
- Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 0 Perkara;
- Perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sejumlah 0 Perkara;
- **Jadi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sejumlah 196 Perkara;**

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Adapun manfaat sidang keliling, antara lain :

- a. Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara;
- b. Biaya transportasi lebih ringan;
- c. Menghemat waktu.

Tidak ada pelaksanaan maupun pagu anggaran di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk kegiatan Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu.

2. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Prodeo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Implementasi perkara prodeo sangat jarang terjadi di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah yang melayani masyarakat dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan dan mengembangkan sikap profesionalnya, yang diwujudkan dengan peningkatan wawasan berfikir kreatifitas dan bertanggungjawab. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Peradilan, pemahaman sikap profesional dirasakan sangat penting, hal ini guna mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan prima yang berkualitas, cepat dan tepat.

Pembinaan Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum meliputi : Formasi Pegawai, Rekrutmen Pegawai dan Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penempatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, Pola Pembinaan Karier Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan, dan Kejurusitaan, serta Pemberhentian Pegawai.

DAFTAR PEGAWAI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA TAHUN 2022

NO.	URAIAN	PTTUN	PTUN	PTUN	PTUN	PTUN	PTUN	PTUN	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Ketua	1	1	1	1	1	1	1	7
2.	Wakil Ketua	-	1	1	1	1	1	1	5
3.	Hakim Tinggi	12	-	-	-	-	-	-	13
4.	Hakim	-	23	14	6	8	4	7	67
5.	Hakim Yustisial	1	-	-	-	-	-	-	1
6.	Panitera	1	1	-	1	1	1	1	6
7.	Sekretaris	1	1	1	1	1	1	1	7
8.	Wakil Panitera	-	-	-	-	-	-	-	0
9.	Kabag. Perencanaan dan KP	1	-	-	-	-	-	-	1
10.	Kabag. Umum dan Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	1
11.	Panitera Muda Perkara	-	1	1	1	1	1	1	7
12.	Panitera Muda Hukum	1	1	1	1	1	1	-	6
13.	Kasubag. Renang	1	-	-	-	-	-	-	1
14.	Kasubag. KP dan TI	1	-	-	-	-	-	-	1
15.	Kasubag. TU dan RT	1	-	-	-	-	-	-	1
16.	Kasubag. KU dan Pelaporan	1	-	-	-	-	-	-	1
17.	Kasubag. Perencanaan, TI dan	-	1	1	1	1	1	1	6

18.	Kasubag. KP, Organisasi, dan Tata Laksana	-	1	1	1	1	1	1	6
19.	Kasubag. Umum dan Keuangan	-	1	1	1	1	1	1	5
20.	Panitera Pengganti	22	20	13	6	12	8	6	81
21.	Jurusita Pengganti	1	4	4	5	3	6	3	25
22.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	2	1	-	1	1	-	1	8
23.	Pengadministrasian Persuratan	-	-	1	-	-	-	-	2
24.	Pengadministrasian Umum	1	-	1	-	-	-	-	2
25.	Bendahara Tingkat Banding	2	-	-	-	-	-	-	2
26.	Penyusun Laporan Keuangan	1	-	-	1	1	-	-	3
27.	Verifikator Keuangan	1	-	-	1	-	-	-	
28.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-	-	1	-	-	3
29.	Analisis Organisasi	-	-	-	-	1	-	-	1
30.	Bendahara Tingkat Pertama	-	-	-	3	1	1	-	4
31.	Analisis Perkara Peradilan	1	-	1	1	1	1	1	4
32.	Pengadministrasian Hukum	-	-	-	-	1	-	1	2
33.	Pengadministrasian Penerimaan	-	-	1	-	-	-	-	1
34.	Teknisi Sarana dan Prasarana	-	-	1	-	-	-	-	1
35.	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur	-	1	-	-	-	-	-	1
36.	Analisis Tata Laksana	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Pranata Kearsipan	-	-	-	1	-	-	-	1
38.	Pengelola Barang Milik Negara	1	-	-	2	-	-	-	-
39.	Komandan Petugas Keamanan	-	-	-	1	-	-	-	1
40.	Pengadministrasian Registrasi Perkara	-	-	-	1	1	-	1	3
41.	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama	-	1	1	1	1	-	1	3
42.	Analisis Kepegawaian Ahli Muda	-	-	-	-	-	-	-	-
43.	Pustakawan Ahli Pertama	-	-	1	1	-	-	-	2
44.	Arsiparis Ahli Muda	-	-	1	1	-	-	-	2
45.	Arsiparis Ahli Pertama	-	-	1	-	-	-	-	1
46.	Analisis Hukum	-	-	-	1	-	-	-	1
47.	Pengelola Perkara	-	-	-	2	-	-	-	1
48.	Pranata Komputer Ahli Muda	-	-	1	-	-	-	-	1
49.	Pranata Komputer Ahli Pertama	-	1	1	-	1	1	1	1
50.	Pranata Komputer Pelaksana	-	-	-	-	-	-	-	1
51.	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	-	-	-	-	-	1	-	
52.	Pustakawan Ahli Muda	-	-	-	1	-	-	-	
53.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	-	-	-	1	-	-	-	
54.	Pranata Keuangan APBN Pelaksana Lanjutan/Mahir	-	-	-	1	1	-	-	
55.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	-	-	-	-	1	-	-	
56.	Pengelola Sistem Dan Jaringan	-	-	-	-	-	1	-	

Dilihat dari daftar keadaan pegawai di Lingkungan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tersebut diatas terdapat pemetaan staf pelaksana menjadi Pejabat Pelaksana yang ditempatkan pada sub bagian menurut kualifikasi yang dimiliki oleh staf pelaksana tersebut. Ditambah lagi banyaknya jabatan fungsional yang langsung dibawah oleh Sekretaris. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 41 Tanggal 13 September 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018, Perihal Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Dalam hal ini terdapat pemetaan sebanyak 28 Jabatan Pelaksana dan 18 Jabatan Fungsional di seluruh Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan masih banyak sub bagian yang belum mendapat pejabat pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sub bagian tersebut. Jadi terlihat jelas sangat kekurangan Tenaga Pejabat Pelaksana, dan banyak terdapat sub bagian atau kepaniteraan yang tidak memiliki pejabat pelaksana.

Dari rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI setiap tahunnya baik dari Pelamar Umum maupun Tenaga PPNPN (Honorar) masih belum mencukupi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya baik itu menyangkut jumlah maupun kemampuan kompetensi bidang maupun substansi, sehingga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan, kami berharap kepada Mahkamah Agung RI untuk memberi alokasi CPNS untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta Satker sewilayah hukum.

Terlebih di sub bagian yang belum memiliki staf dan sub bagian Kepegawaian dan TI yang notabene pekerjaan yang dibebankan sangat banyak, simultan dan kondisional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kiranya Mahkamah Agung RI apabila terdapat rekrutmen PNS ataupun PPPK di Tahun 2023 bisa memberikan tambahan Pegawai ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, khususnya tenaga Pejabat Pelaksana sesuai dengan jumlah maupun tingkat pendidikan yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas – tugas sebagai supporting unit pengadilan baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan.

1. Mutasi

Hakekatnya mutasi adalah Mutasi Kepegawaian adalah segala perubahan mengenai seseorang Pegawai Negeri Sipil, seperti pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, pemensiunan, perubahan susunan keluarga, dan lain-lain. Dalam sudut pandang positif adalah merupakan bentuk perhatian Pimpinan terhadap bawahan. Mutasi dilakukan antara lain bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara Sumber Daya Manusia yang ada dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai dan untuk menghindari kejenuhan pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh proses mutasi yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI. Berikut adalah daftar nama Hakim Tinggi, Hakim dan Pegawai yang melaksanakan mutasi keluar dan masuk dari Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

**DAFTAR NAMA HAKIM TINGGI DAN PEGAWAI YANG MUTASI MASUK KE PT TUN SURABAYA
DAN WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA TAHUN 2023**

NO	NAMA	NIP	SATKER ASAL	SATKER TUJUAN	SK
<i>Pengadilan Tinggi TUN Surabaya</i>					
1.	Dr. DISIPLIN F. MANAO., S.H., M.H.	196107121988031006	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
2.	Dr. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.	196104221983031003	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
3.	H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.	195705171986121001	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
4.	RIYANTO, S.H.	195803181985121001	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
5.	FARI RUSTANDI, S.H., M.H.	196004231986031002	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
<i>Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya</i>					
6.	BAIQ YULIANI, S.H.	196807021998032003	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
7.	HARYATI, S.H., M.H.	197306271993032007	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022

8.	HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H	197601262002121004	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
9.	ZUBAIDA DJAIZ BARANYANAN, S.H.	197506022000122002	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
10.	SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.	197910012008052001	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
11.	DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H., M.Kn.	197812152007041001	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
12.	VINKY RIZKY OKTAVIA, S.H., M.H.	198810192017122001	Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022

**DAFTAR NAMA HAKIM TINGGI DAN PEGAWAI YANG MUTASI KELUAR KE PT TUN SURABAYA
DAN WILAYAH HUKUM PT TUN SURABAYA TAHUN 2023**

NO	NAMA	NIP	SATKER ASAL	SATKER TUJUAN	SK
<i>Pengadilan Tinggi TUN Surabaya</i>					
1.	DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H., M.H.	195710011985031001	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
2.	Dr. SANTER SITORUS, S.H., M.H.	195710101986011001	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
3.	Dr. BAMBANG HERIYANTO, S.H., M.H.	196212121988031002	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
4.	H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.	196105141986121001	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
5.	KAMER TOGATOROP, S.H., M.AP.	195910141986031004	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
6.	T. SJAHNUR ANSAHRI, S.H., M.H.	195609291982031009	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
7.	KETUT RASMEN SUTA, S.H.	196003021986121001	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022

Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya					
8.	R. BASUKI SANTOSO, S.H., M.H.	196603091992031002	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
9.	BAGUS DARMAWAN, S.H., M.H.	196911191998031003	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	Pengadilan Tata Usaha Negara Medan	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
10.	BAIQ YULIANI, S.H.	196807021998032003	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
11.	DYAH WIDIASTUTI, S.H., M.H.	197703142000122002	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
12.	ROSIDAH, S.H.	197711172001122002	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
13.	FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.	198407092009121002	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
14.	GANDA KURNIAWAN, S.H.	198301312007041001	Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya	Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
15.	ERNA DWI SAFITRI, S.H., M.H.	198002012006042003	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
16.	RAHMI AFRIZA, S.H., M.H.	198304102006042003	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
17.	ROS ENDANG NAIBAHO, S.H.	197906052008052001	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022

					Tgl. 28/11/2022
18.	RAHMADIAN NOVIRA, S.H.	199311302017122003	Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar	Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
19.	ANITA LINDA SUGIARTO, S.H., M.H.	198107042009042006	Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram	Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
20.	FEBRIYANSYAH ROZARIUS, S.H.	199202212017121003	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022
21.	AINI SAHARA, S.H.	199203252017122003	Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang	Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu	SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 340/KMA/SK/XI/2022 Tgl. 28/11/2022

Dalam rangka usaha meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka dipandang perlu melaksanakan pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan pangkat disini merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianannya.

Pada Tahun 2022 Mahkamah Agung RI untuk mempercepat proses usul kenaikan pangkat menggunakan sistem Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), dimana Pengadilan Tingkat Banding diberikan wewenang untuk memvalidasi dan memverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI), untuk setiap usul pangkat, baik yang berasal dari Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dan Satuan Kerja di Lingkungan Kerjanya, apakah memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan usul kenaikan pangkat tersebut pada periode berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut setiap satuan kerja diwajibkan untuk selalu mengupdate (memperbaharui) setiap data pegawai pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI, sehingga proses validasi dan verifikasi dapat berjalan dengan lancar dan usul kenaikan pangkat setiap pegawai dapat berjalan tepat waktu sesuai periode berjalan.

Selama tahun 2022 usul kenaikan pangkat otomatis periode April yang masuk ke daftar monitoring KPO PTTUN Surabaya adalah sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) Orang yang terdiri dari tenaga teknis yakni sebanyak 20 (Dua Puluh) Orang, non teknis sebanyak 2 (Dua) Orang, kenaikan pangkat pilihan struktural sebanyak 3 (Tiga) Orang, dan ditolak sebanyak 2 (Dua) Orang dikarenakan tidak memenuhi syarat. Pada periode Oktober 2022 yang masuk ke daftar monitoring Kenaikan Poangkat Otomatis (KPO) PTTUN Surabaya adalah sebanyak 7 (Tujuh) Orang yang terdiri dari tenaga teknis yakni sebanyak 5 (Lima) Orang, non teknis sebanyak 0 (-) Orang, kenaikan pangkat pilihan sebanyak 1 (Satu) Orang, dan ditolak sebanyak 1 (Satu) Orang dikarenakan tidak memenuhi syarat. Seluruh usulan kenaikan pangkat tenaga teknis telah dikirim ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI. Seluruh usulan kenaikan pangkat tenaga teknis telah dikirim ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI dan Non Teknis serta Pilihan telah diproses ke BKN setempat dan Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.

2. Promosi

Promosi adalah proses kegiatan pemindahan pegawai dari suatu jabatan kepada jabatan lain yang lebih tinggi. Dengan demikian promosi akan selalu diikuti oleh tugas, tanggung jawab dan wewenang yang lebih tinggi dari jabatan yang diduduki sebelumnya. Dalam rangka pengembangan dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu melaksanakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, baik Jabatan Struktural maupun Fungsional.

Sesuai dengan prinsip *The Right Man in The Right Place*, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang akan diusulkan untuk menduduki suatu jabatan struktural tertentu diperlukan penilaian dari segala aspek dalam suatu pertimbangan yang obyektif, yang nantinya dipakai sebagai bahan rekomendasi bagi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengusulkan usulan tersebut ke Mahkamah Agung RI.

Untuk menjamin adanya obyektifitas dari penilaian dan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk suatu tim yaitu Komite Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Komite BAPERJAKAT), di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Komite Baperjakat tersebut telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/2205/KP.04.6/12/2022 Tanggal 12 Desember 2022 Perihal Perubahan Kedua (Tim Promosi Dan Mutasi) Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun laporan hasil Rapat Baperjakat tersebut selama Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**Usul Promosi Jabatan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Tahun 2022 Periode 1 (21 Juni 2022)**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN YANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA				
1.	YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H., M.H. NIP. 197202022992032006	Panitera Muda Perkara PTUN Yogyakarta	Panitera Muda Hukum PTUN Semarang	Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor :

				W3- TUN/977/KP.04.6/6/2022
2.	ELLA ROSIANA, S.H., M.H. NIP. 196709231994032001	Panitera Muda Hukum PTUN Yogyakarta	Panitera Pengganti PTTUN Jakarta	Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM				
3.	H. DWI RIYADI, S.H., M.Kn. NIP. 19640804199203 003	Panitera PTUN Mataram	Panitera PTUN Semarang	Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3- TUN/977/KP.04.6/6/2022

**Usul Promosi Jabatan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Tahun 2022 Periode 2 (19 Desember 2022)**

-

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN YANG	KETERANGAN
1	2	3	4	5
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA				
1.	LENI SUSILOWATI, S.E. NIP. 197903032006042001	Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur PTUN Surabaya	Kepala Sub Bagian Umum Dan Keuangan PTUN Surabaya	Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3- TUN/2254/KP.04.6/12/2022
2.	SLAMET HARYONO, S.H. NIP. 197611291995031001	Juru Sita Pengganti PTUN Surabaya	Panitera Pengganti PTUN Surabaya	Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan
3.	MUHAMMAD ROIHAN, S.HI. NIP. 197805032006041004	Analisis Perkara Peradilan PTUN Surabaya	Juru Sita Pengganti PTUN Surabaya	Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor :

				W3- TUN/2254/KP.04.6/12/2022
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG				
4.	NUR ROCHMAN, S.H. NIP. 199110222019031004	Analisis Perkara Peradilan PTUN Semarang	Juru Sita Pengganti PTUN Semarang	Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3- TUN/2254/KP.04.6/12/2022
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG				
5.	JEAN HELMI EKA BOLLA, S.H. NIP. 199701172019032002	Analisis Perkara Peradilan PTUN Kupang	Panitera Pengganti PTUN Kupang	Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3- TUN/2254/KP.04.6/12/2022
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKARAYA				
6.	PUSPHITA BAMBANG PARDJO, S.H. NIP. 198503212006042001	Adminitrasi Umum	Sekretaris dan/ atau Kepala Sub Bagian Pada PTUN Kupang.	Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3- TUN/2254/KP.04.6/12/2022

Perlu kami sampaikan bahwa untuk pengkaderan jabatan struktural tersebut perlu diadakan diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sesuai dengan jenjang yang ada.

Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, selama tahun 2022 telah mengadakan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh seluruh Satuan Kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yaitu Bimbingan Teknis untuk Tenaga Teknis (BimTek bagi Pejabat Fungsional dan Struktural Kepaniteraan) sedangkan untuk tenaga non teknis, bimbingan teknis lebih banyak diselenggarakan oleh Pusdiklat Mahkamah Agung RI secara daring dan luring, karena dengan diklat diharapkan mampu menciptakan Sumber Daya

Manusia aparatur yang memiliki kompetensi berupa peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan, semangat persatuan dan kesatuan, serta pengembangan wawasan.

Oleh karena itu Mahkamah Agung RI sebagai pusat kendali sedapatnya lebih intensif lagi dalam mengadakan pembekalan kepada aparatur – aparturnya baik untuk Tenaga Teknis maupun Non Teknis dipusat maupun di daerah berupa diklat – diklat, sosialisasi maupun bentuk – bentuk pelatihan yang lain.

3. Pensiun

Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pensiun dilaksanakan untuk menjamin produktivitas kerja suatu instansi agar tetap seimbang mengingat semakin bertambahnya usia seorang pegawai maka produktivitas kerjanya pun akan menurun. Berikut adalah daftar pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah purna tugas di tahun 2022 :

**DAFTAR NAMA HAKIM DAN PEGAWAI SEWILAYAH
HUKUM PENGADILAN TINGGI TUN SURABAYA YANG
TELAH PURNA TUGAS PADA TAHUN 2022**

No.	NIP	Nama	Jabatan	TMT Pensiun
1	2	3	4	5
1.	195510061988031001	Dr. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi	1 November 2022 (67 Tahun)
2.	196001061983032005	ROSDIYATMI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1 Februari 2022 (62 tahun)
3.	196012261988031002	H. SETYO HENDARTO, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1 Januari 2023 (62 tahun)
4.	196005011982032002	MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	1 Juni 2022 (62 tahun)

Program Pensiun merupakan bagian dari program kesejahteraan yang diharapkan bisa memberikan ketenangan PNS dalam bekerja dan mampu memotivasi untuk meningkatkan produktivitas karena adanya suatu jaminan hidup di masa yang akan datang. Dengan adanya program pensiun maka perencanaan pembinaan masa depan seorang pegawai setelah pensiun dapat terjamin.

Dukungan Teknologi Informasi

Dalam melaksanakan tugas sehari – hari pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya didukung oleh beberapa aplikasi yang wajib dilaksanakan dalam penyelesaian suatu pekerjaan antara lain :

1. Aplikasi SAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian) BKN RI

Bahwa sehubungan dengan Surat Deputi Bidang INKA BKN tanggal 17 Juni 2011 nomor : E 26-30/V

178-1803, tentang Pilot Project NCSIS, maka dilakukan perubahan sistem aplikasi pelayanan dari Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK Desktop) ke Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian Webbase (SAPK Webbase) dan berdasarkan Perka BKN No. 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian dan Perka BKN No. 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengembangan Database PNS, BKN mewajibkan seluruh Instansi pemerintah baik vertical maupun horizontal untuk menggunakan aplikasi SAPK BKN dalam memproses Usul Kenaikan Pangkat dan Pensiun bagi setiap pegawai yang diusulkan, dan apabila dalam mengusulkan pangkat dan pensiun pegawai tidak melalui aplikasi SAPK maka usulan tersebut akan ditolak dan tidak akan diproses permohonan nota persetujuannya oleh BKN.

Dalam melaksanakan aplikasi SAPK tersebut kami di Sub Bagian Kepegawaian dan TI telah berjalan dengan lancar meskipun terkadang mengalami kendala, misalnya data pegawai yang tidak muncul pada saat proses entri data untuk usul kenaikan pangkat dan pensiun dikarenakan pegawai tersebut melaksanakan mutasi dan itu merupakan kewenangan BKN, maka admin SAPK Sub Bagian Kepegawain dan TI segera menghubungi petugas SAPK pada kanreg I BKN Yogyakarta , II BKN Surabaya, dan X BKN Denpasar untuk memunculkan data pegawai tersebut dimana pegawai tersebut melaksanakan mutasi sesuai dengan wilayah masing – masing Kanreg BKN agar usul kenaikan pangkat atau pensiun pegawai tersebut dapat diproses. Koordinasi admin SAPK Sub Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dengan operator SAPK Satker PTUN sewilayah Hukum dan Petugas SAPK pada Kanreg I, II, dan X BKN perlu selalu dilakukan sehingga apabila kita mengalami kendala dalam pelaksanaan aplikasi dimaksud dapat segera terselesaikan, terutama pada saat usul KP atau pensiun sehingga dapat diproses tepat pada waktunya.

2. Aplikasi MySAPK BKN RI

Aplikasi MySAPK BKN merupakan aplikasi milik Badan Kepegawaian Negara yang bertujuan untuk memudahkan PNS dalam mendapatkan pelayanan kepegawaian dengan aplikasi berbasis android yang mudah dalam penggunaannya.

Secara keseluruhan My SAPK merupakan sebuah sistem aplikasi pelayanan kepegawaian BKN untuk memudahkan kegiatan administrasi para PNS seperti penginputan gaji, PNS, dan lain sebagainya. Aplikasi ini juga sudah bisa di download di play store.

Fitur My SAPK BKN :

Sebagai salah satu aplikasi untuk memudahkan pelayanan kepegawaian di BKN, tentu ada banyak fitur di dalamnya. Berikut beberapa fitur yang ada di dalam My SAPK BKN:

- ✓ Profil PNS : merupakan sebuah fitur yang di dalamnya berisi data utama pegawai, posisi, jabatan dan golongan. Fitur ini berisi tentang identitas pribadi mengenai pegawai PNS tersebut secara garis besar.
- ✓ Ubah Data : Fitur ini bermanfaat agar ASN atau pegawai bisa mengubah data yang ada di dalam database Nasional BKN seperti nomor telepon, alamat email, BPJS, NPWP, nomor Handphone, alamat rumah dan lain sebagainya.
- ✓ My KPE : My KPE atau Kartu Pegawai Elektronik di dalam aplikasi ini merupakan versi virtual. Sekarang ASN atau pegawai tidak perlu lagi mencetak Kartu Pegawai Elektronik, Anda hanya perlu menggunakan KPE Virtual yang bisa di download dan dicetak untuk keperluan administrasi kepegawaian seperti Bapertarum, BPJS Kesehatan dan PT. Taspen.
- ✓ Otentifikasi SK : Fitur Otentifikasi SK merupakan fitur yang berisi mengenai Surat Keputusan yang telah dikeluarkan oleh SAPK.
- ✓ Pelacakan : Fitur pelacakan ini digunakan oleh ASN untuk mengetahui sejauh mana proses kepegawaian yang dimilikinya. Fitur ini sangat penting untuk para ASN atau pegawai.
- ✓ Personalisasi : Personalisasi merupakan salah satu fitur di dalam aplikasi My SAPK BKN yang berfungsi untuk mengganti password di aplikasi My SAPK BKN.

Banyak sekali manfaat yang dimiliki aplikasi My SAPK BKN ini untuk para ASN dan BKN. Tidak heran jika aplikasi ini banyak di download dan diinstall oleh para ASN di Indonesia. Berikut beberapa manfaat dari My SAPK BKN.

- ✓ Memudahkan ASN dalam menyimpan data atau informasi.
- ✓ Memudahkan ASN menyampaikan informasi pribadi atau data diri langsung ke database BKN.
- ✓ Membuat ASN mudah dalam mengubah beberapa informasi dengan lebih cepat.
- ✓ Memudahkan permasalahan administrasi ketenagakerjaan milik para ASN Indonesia.

- ✓ Memudahkan ASN dalam mengecek kepegawaian-nya di BKN
- ✓ Memudahkan BKN dalam memperbarui informasi dan data milik ASN atau pegawai.
- ✓ Dengan adanya My SAPK BKN diharapkan proses administrasi ASN atau BKN mengalami kemudahan baik untuk ASN itu sendiri atau untuk BKN. Untuk itu pihak BKN saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan sosialisasi mengenai aplikasi BKN yang sangat bermanfaat dan membantu ini.

Cara menggunakan aplikasi ini juga sangat mudah dan praktis. Sehingga dapat menunjang produktifitas dan efisiensi ASN Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam Bekerja.

3. Aplikasi SIASN

Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) adalah aplikasi yang bertujuan untuk mengintegrasikan data ASN secara nasional meliputi seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Instansi Pemerintah Daerah.

Adapun layanan-layanan yang ada pada SIASN untuk mendukung manajemen ASN adalah :

- a) Perencanaan
Meliputi : Evaluasi Jabatan, Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) dan Perencanaan Kebutuhan berupa pengajuan SOTK + info jabatan, Pengajuan Penetapan Formasi Nasional dan Standar Kompetensi Jabatan.
- b) Perekrutan dan Seleksi
Meliputi : Pendaftaran CASN, Penetapan NIP, Seleksi Terbuka SSJPT, Seleksi Pindah Instansi Melalui SSPI.
- c) Pengembangan Kapasitas
Meliputi : Talent Manajemen, Manajemen Jabatan Fungsional.
- d) Penilaian Kinerja dan Reward
Meliputi : Layanan Kinerja, Integrated Disiplin (IDIS), Monitoring Wasdal, Layanan BANKUM, Layanan BAPEK.
- e) Promosi Rotasi dan Karir
Meliputi : Peremajaan Data dan PDM, Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan, Pindah Instansi, Pencantuman Gelar, Layanan SKK.
- f) Purna Bakti
Meliputi : Pemberhentian dan Pensiun

4. Aplikasi E-Kinerja

Aplikasi E-Kinerja adalah Aplikasi Pengisian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara berbasis Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022.

5. Aplikasi Tapera

Aplikasi Tapera adalah Aplikasi layanan kepesertaan BP Tapera yang meliputi layanan untuk Peserta Tapera dan Pemberi kerja Tapera untuk mengelola data Peserta dan Informasi Pembayaran Simpanan.

6. Aplikasi e-LHKPN KPK RI

Aplikasi e-LHKPN adalah aplikasi penyampaian laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memuat berbagai kumpulan dokumen tentang pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang telah diverifikasi oleh KPK dalam bentuk Tambahan Berita Negara (TBN). Aplikasi ini dapat diakses secara daring (dalam jaringan) oleh siapa saja dengan tujuan agar terciptanya transparansi publik. Melalui aplikasi ini, masyarakat juga dapat mengetahui perkembangan kekayaan para penyelenggara negara. Tujuan lainnya adalah sebagai kontrol dan salah satu mekanisme untuk menilai kejujuran dan integritas penyelenggara negara.

7. Aplikasi SIHARKA - LHKASN

Aplikasi SIHARKA adalah Sistem Informasi Pelaporan Harta Kekayaan ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LHKASN diharapkan dapat bermanfaat sebagai upaya pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pencegahan penyalahgunaan wewenang, bentuk transparansi ASN, dan penguatan integritas ASN.

8. Aplikasi KOMDANAS

KOMDANAS merupakan sebuah aplikasi yang berfungsi sebagai media penyimpanan dan database sentral berisi data – data aset, kepegawaian, keuangan, dan remunerasi. Tujuan dibuatnya sistem komputasi ini tidak lain adalah untuk menciptakan Good Governance, yang menjadi impian semua pihak agar tercipta kesejahteraan dan kestabilan. Syarat – syarat Pemerintah yang baik adalah responsiveness (cepat tanggap), transparansi, penegakan hukum, berpartisipasi, efektif dan efisien.

Berbagai syarat itulah yang kini sedang dan terus dilakukan Mahkamah Agung. Tidak hanya itu, keterbukaan informasi, peningkatan pelayanan, serta terus meningkatkan performa dan kapabilitas dalam reformasi birokrasi juga sedang dan terus dilakukan lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebagai contoh: Aplikasi KOMDANAS digunakan Sub Bagian

Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya untuk entry data absensi pegawai. Dari data absensi pegawai berdasarkan aplikasi KOMDANAS tersebut dijadikan dasar untuk pengajuan tunjangan kinerja pegawai (REMUNERASI), karena apabila absensi pegawai tidak dimasukkan dalam aplikasi KOMDANAS maka usul pengajuan REMUNERASI pegawai akan ditolak oleh Biro Keuangan Mahkamah Agung RI. Dalam pelaksanaan aplikasi KOMDANAS Sub Bagian Kepegawaian dan TI selalu berkoordinasi dengan Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan terutama dalam hal verifikasi data absensi sehingga pengajuan remunerasi pegawai dapat diajukan tepat waktu berdasarkan data yang akurat, selain itu koordiansi dengan Satker lain perlu juga dilakukan terutama apabila ada pegawai yang melaksanakan mutasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, agar data absensi dari pegawai tersebut dapat dientry di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

9. Aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)

Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 559/DJU/HK.00.7/VI/2012 tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Lingkungan Peradilan Umum, Mahkamah Agung RI membangun sebuah aplikasi pencatatan dan penelusuran perkara di Pengadilan yaitu SIPP.

Sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) merupakan web-based application, suatu aplikasi yang terinstal di server dan diakses menggunakan penjelajah web atau yang dikenal sebagai browser melalui suatu jaringan Internet atau intranet.

Tujuan utama SIPP dibangun dan dikembangkan adalah untuk dapat memudahkan dan menunjang semua petugas pengadilan dalam menjalankan tupoksinya, yang selanjutnya disebut pengguna.

10. Aplikasi SIKEP (Sistem Infomasi Kepegawaian) Mahkamah Agung RI

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan di bidang sumber daya manusia di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Empat Lingkungan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana di amanatkan dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, supaya dapat berjalan secara efisien, tepat, dan akurat

terhadap seluruh informasi data kepegawaiaan, guna mendukung proses kenaikan pangkat secara paperless, usulan jabatan, promosi mutasi, kebutuhan formasi pegawai, serta dalam rangka penerapan E-Governance, maka dalam rangka menuju integrasi seluruh sistem informasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI, masing – masing satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung diperintahkan untuk menggunakan Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI. Pada Pengadilan Tinggi TUN Surabaya entry update data pegawai selalu dilakukan agar keakuratan data pegawai dalam rangka persiapan proses kenaikan pangkat secara paperless, pensiun otomatis, usulan jabatan, serta promosi mutasi dapat tersedia.

Untuk menunjang pelaksanaan aplikasi tersebut diatas dukungan sarana dan prasarana berupa komputer dan jaringan internet sudah cukup memadai, namun demikian beberapa kendala masih sering terjadi, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari Mahkamah Agung RI tentang pelaksanaan operasional Aplikasi tersebut. Oleh karena itu koordinasi dan komunikasi sering dilakukan oleh para admin Pengadilan Tinggi TUN Surabaya atau pengguna aplikasi tersebut diatas dengan Admin Mahkamah Agung RI ataupun Kanreg BKN.

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersumber dari dana APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Sedangkan sumber lainnya adalah dari Pihak Ketiga untuk membiayai kegiatan administrasi dalam penyelesaian perkara.

Dari kedua sumber tersebut dapat diuraikan pengelolaan keuangannya dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.01.2.548940/2022 TGL. 17 NOVEMBER 2021

DIPA dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.548940/2022 tertanggal 17 November 2021 ini merupakan DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Bahasa gaul atau kerennya disebut sebagai “DIPA 01”, kata 01 merupakan kode dari Unit Eselon 1 yaitu Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. DIPA 01 ini merupakan DIPA yang dikelola dan dimiliki oleh keempat lingkungan peradilan.

Dalam pengelolaannya DIPA 01 ini telah mengalami beberapa kali revisi, sebagai berikut :

- 1) Revisi DIPA Ke-1 tertanggal 14 Desember 2021;
- 2) Revisi DIPA Ke-2 tertanggal 12 April 2022;
- 3) Revisi DIPA Ke-3 tertanggal 13 Juli 2022;
- 4) Revisi DIPA Ke-4 tertanggal 12 Oktober 2022;
- 5) Revisi DIPA Ke-5 tertanggal 26 Oktober 2022;
- 6) Revisi DIPA Ke-6 tertanggal 29 November 2022;
- 7) Revisi DIPA Ke-7 tertanggal 29 Desember 2022

Adapun realisasi anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berikut satuan kerja yang berada di bawahnya tersaji dalam matriks di bawah ini :

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Realisasi (%)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1.	548940	PT TUN Surabaya	12.384.521.000	3.385.449.000	1.756.500.000	12.355.630.376	3.314.272.245	1.713.126.735	99,18
2.	526767	PTUN Surabaya	10.169.737.000	2.013.590.000	289.500.000	10.041.416.510	1.969.342.816	289.483.855	98,61
3.	531830	PTUN Semarang	8.698.588.000	1.648.449.000	335.800.000	8.671.996.885	1.546.748.849	335.750.350	98,79
4.	578801	PTUN Yogya	6.380.327.000	1.567.177.000	50.500.000	5.183.348.720	1.397.640.908	50.500.000	82,91
5.	559861	PTUN Denpasar	5.848.483.000	1.505.246.000	1.292.457.000	5.733.512.974	1.468.026.207	1.237.371.196	97,60
6.	578871	PTUN Mataram	4.107.615.000	1.742.058.000	754.055.000	4.072.678.171	1.663.297.395	746.675.720	98,16
7.	539121	PTUN Kupang	4.527.566.000	1.795.998.000	100.500.000	3.732.228.386	1.736.514.078	99.267.000	86,67

Dari matriks diatas, jika dilihat dari prosentase realisasi anggaran yang hampir mendekati 100%, merupakan gambaran bahwa pengelolaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta satuan kerja di bawahnya sudah sangat baik.

2. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.05.2.548941/2022 TGL. 17 NOVEMBER 2021

DIPA dengan Nomor : SP DIPA-005.05.2.548941/2022 tertanggal 17 November 2021 ini merupakan DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahasa gaul atau kerennya disebut sebagai “DIPA 05”, kata 05 merupakan kode dari Unit Eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. DIPA 05 ini, merupakan DIPA yang dikelola dan dimiliki khusus di lingkungan Peradilan Militer dan TUN, sedangkan lingkungan Peradilan yang lainnya memiliki DIPA dengan kode tersendiri sesuai Unit Eselon 1 / Ditjennya masing-masing.

Dalam pengelolaannya DIPA 05 ini telah mengalami beberapa kali revisi, sebagai berikut :

- 1) Revisi DIPA Ke-1 tertanggal 01 Juli 2022;
- 2) Revisi DIPA Ke-2 tertanggal 12 Juli 2022;
- 3) Revisi DIPA Ke-3 tertanggal 12 Oktober 2022;
- 4) Revisi DIPA Ke-4 tertanggal 19 Oktober 2022;

Adapun realisasi anggaran DIPA 05 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berikut satuan kerja yang berada di bawahnya tersaji dalam matriks di bawah ini :

No	Kode Satker	Nama Satker	Pagu Anggaran			Realisasi Anggaran			Realisasi (%)
			Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	
1.	548941	PT TUN Surabaya	0	240.379.000	0	0	223.231.670	0	92,87
2.	526768	PTUN Surabaya	0	49.700.000	0	0	49.187.417	0	98,97
3.	531831	PTUN Semarang	0	46.852.000	0	0	43.360.500	0	92,55
4.	578802	PTUN Yogyakarta	0	37.030.000	0	0	33.662.000	0	90,90
5.	559862	PTUN Denpasar	0	40.400.000	0	0	38.863.700	0	96,20
6.	578872	PTUN Mataram	0	36.500.000	0	0	36.428.200	0	99,80
7.	539122	PTUN Kupang	0	36.900.000	0	0	35.498.500	0	96,20

Dari matriks diatas, jika dilihat dari prosentase realisasi anggaran yang ada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan satuan kerja di bawahnya sudah sangat baik.

3. PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA

Adapun keadaan pengelolaan Keuangan Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya per 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding

Biaya Proses :

No.	Uraian	Jumlah			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.	Saldo Awal	8.782.100	-	-	-
2.	Penerimaan	-	8.360.000	4.110.000	-
3.	Materai	-	-	180.000	-
4.	Biaya Pemberitahuan	-	-	-	-
5.	Hak-hak Kepaniteraan	-	-	180.000	-
6.	Biaya Pemberkasan / ATK	-	-	4.140.000	-
7.	Saldo Akhir	-	-	-	8.532.100
	Jumlah	8.782.100	8.360.000	8.610.000	8.532.100

b. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Biaya Perkara / Panjar Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah			
		Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	2	3	4	5	6=(3+4-5)
1.	Saldo Awal	-	-	-	-
2.	Penerimaan	-	-	-	-
3.	PNBP	-	-	-	-
4.	Pengeluaran untuk seluruh pembelian ATK secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu	-	-	-	-
	Saldo Akhir	-	-	-	-
	Jumlah	-	-	-	-

4. PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Januari s/d Desember 2022 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya se wilayah hukum, yang kemudian dilaporkan ke Badan Urusan Administrasi MA RI, adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

N O	POS MAP	URAIAN JENIS PNBP	PT TUN SBY	PTUN SBY	PTUN SMG	PTUN YOGYA	PTUN DPS	PTUN MTR	PTUN KPG	JUMLAH
1	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	5.669.003	2.877.500	8.471.664	10.169.000	14.800.000	10.763.400	11.763.000	64.513.567
2	425231	Pendapatan Pengesahan Surat Bawah Tangan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	-	200.000	1.230.000	140.000	900.000	170.000	140.000	2.780.000
4	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	-	20.090.000	8.400.000	890.000	2.540.000	5.090.000	3.140.000	40.150.000
5	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.970.000	77.709.000	21.323.000	3.333.900	13.164.700	13.765.500	7.925.000	139.191.100
6	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	-	-	-	-	-	-	-	-
7	425991	Penerimaan Persekot/uan g muka gai	-	-	-	-	-	-	-	-
		JUMLAH	7.639.003	100.876.500	39.424.664	14.532.900	31.404.700	29.788.900	22.968.000	246.634.667

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Pengadaan

Pada tahun 2022 dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdapat kegiatan belanja modal berupa:

- Pengadaan Jasa Sewa Mesin Foto Copy Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 462.000.000,00 (Empat ratus enam puluh dua

juta rupiah) dengan metode tender cepat sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: W3-TUN/296.02/PL.08/2/2022 tanggal 8 Februari 2022 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 10 Februari 2022.

- b. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa 21 unit PC Kepaniteraan dan 2 unit Printer dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 293.500.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan metode e-purchasing sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: W3-TUN/298/PL.08/1/2022 tanggal 14 Januari 2022 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 31 Januari 2022.
- c. Pengadaan Pekerjaan Pemasangan Paving Blok dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 172.000.000,00 (Seratus tujuh puluh dua juta rupiah) dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: W3-TUN/1372.01/PL.08/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 28 September 2022.
- d. Pengadaan Perencanaan Renovasi Rumah Dinas dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 86.500.000,00 (Delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor: W3-TUN/622.09/PL.08/1/2022 tanggal 26 Januari 2022 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 11 Maret 2022.
- e. Pengadaan Renovasi Rumah Dinas Kantor dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 636.000.000,00 (Enam ratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan metode tender sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : W3-TUN/2105/PL.08/11/2022 tanggal 9 Nopember 2022 dan Adendum SPK Nomor : W3-TUN/2105.01/PL.08/11/2022 tanggal 9 Nopember 2022 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 23 Nopember 2022.
- f. Pengadaan Pengawasan pekerjaan Renovasi Rumah Dinas kantor dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 50.500.000,00 (lima puluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan metode pengadaan langsung sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : W3-TUN/1137.02/PL.08/7/2022 tanggal 12 Juli 2022 dan SPK Adendum Nomor : W3-TUN/2120/PL.08/11/2022 tanggal 9 Nopember 2022 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 23 Nopember 2022.
- g. Pengadaan Genset dan Rumah Genset dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 454.000.000,- (Empat ratus lima puluh empat juta rupiah). Pengadaan Mesin Genset dengan pagu sebesar Rp. 411.000.000,- (Empat ratus sebelas juta rupiah) dengan metode e-purchasing sesuai Surat Perintah Kerja Nomor : W3-TUN/1993/PL.08/11/2022 tanggal 14 Nopember 2022 dan pekerjaan telah selesai sesuai BAST Nomor : W3-TUN/1993.2/PL.08/12/2022 tanggal 8 Desember 2022. Pengadaan Rumah Genset dengan pagu sebesar Rp. 43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah) metode pengadaan langsung sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor : W3-TUN/2027.07/PL.08/11/2022 dan pekerjaan telah selesai dengan BAST Nomor : W3-TUN/2027.09/PL.08/12/2022 pada tanggal 8 Desember 2022.

2. Pemeliharaan

Untuk kegiatan pemeliharaan kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tahun 2022 terdiri atas:

- a. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan meliputi pemeliharaan gedung kantor, halaman kantor, tempat ibadah/ mushola, pos jaga, dan garasi kendaraan dinas pimpinan dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 481.538.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- b. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya berupa pemeliharaan rumah negara dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 78.600.000,00 (Tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi pemeliharaan alat inventaris kantor berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), personal komputer, laptop, printer, AC Split, dan inventaris kantor dengan nilai pagu anggaran sebesar Rp 315.132.000,00 (Tiga ratus lima belas juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Kegiatan pemeliharaan ini dilaksanakan sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022.

3. Penghapusan

Pada tahun anggaran 2022 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengusulkan kembali rencana penghapusan Barang Milik Negara berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Timor dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Suzuki RC 100 yang belum laku pada lelang penghapusan pada tahun 2019.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana berupa kondisi gedung kantor, fasilitas kantor (berupa peralatan dan mesin) kendaraan dinas, dan rumah dinas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat dilihat dalam matrik di bawah ini:

No	Sarana Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
	Sarana/Prasarana Gedung		
1	Ruang Ketua	1	
2	Ruang Wakil Ketua	1	
3	Ruang Hakim	12	
4	Ruang Panitera	1	
5	Ruang Sekretaris	1	
6	Ruang Sidang Umum	2	
7	Ruang Kepaniteraan	3	
8	Ruang Kesekretariatan	6	
9	Ruang Arsip	3	
10	Ruang Perpustakaan	1	
11	Ruang Gudang	2	
12	Ruang Server	1	
13	Ruang Mushola	1	
14	Ruang Pos Jaga	1	
15	Ruang PTSP	1	
16	Ruang Tamu Terbuka	1	
17	Ruang Mediasi	1	
18	Ruang Kesehatan/ Laktasi	1	
19	Toilet	6	
20	Dapur	1	

	Sarana/ Prasarana Fasilitas Perkantoran		
1	A.C. Split	55	
2	Alat Pembersih Lainnya	1	
3	Audio Mixing Portable	1	
4	Audio Visual	1	
5	Brankas	2	
6	Camera Conference	1	
7	Camera Digital	1	
8	CCTV	5	
9	Facsimile	3	
10	Filing Cabinet Besi	68	
11	Finger Printer	3	
12	Headmachine Besar	1	
13	Kipas Angin	8	
14	Kursi Besi/ Metal	407	
15	Kursi Kayu	21	
16	Lambang Garuda Pancasila	1	
17	Lambang Instansi	1	
18	LCD Projector/ Infocus	2	
19	Lemari Besi/ Metal	32	
20	Lemari Kayu	40	
21	Loudspeaker	4	
22	Meja Kerja Kayu	108	
23	Meja Komputer	10	
24	Meja Rapat	40	
25	Meja Resepsionis	1	
26	Mesin Fotocopy Folio	1	
27	Mesin Ketik Elektronik/ Selektik	2	
28	Mesin Ketik Manual	2	
29	Microphone	1	
30	Palu Sidang	1	
31	Partisi	1	
32	Pataka	1	
33	Personal Computer	2	
34	Photo Tustel	1	
35	Portabel Router	1	
36	Rak Besi	11	
37	Rak Kayu	3	
38	Roll Opek	6	
39	Sice	30	
40	Sketsel	1	
41	Sound System	3	
42	Tabung Pemadam Api	2	
43	Tangki Air	1	
44	Telephone (PABX)	2	
45	Televisi	6	
46	Tiang Bendera	2	
47	UPS	7	
48	Unit Tranceiver	4	
49	Wireless Amplifier	1	
50	Auto Switch	1	
51	Internet	1	
52	Komputer Jaringan Lainnya	1	
53	Lap Top	36	
54	Line Printer	31	
55	Modem	1	

56	P.C Unit	68	
57	Rak Server	2	
58	Router	1	
59	Scanner	3	
60	Server	2	
61	Monografi	2	

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I.	Rumah Dinas					
1	Rumah Dinas Ketua	1	-	1	-	
2	Rumah Dinas Wakil Ketua	1	-	1	-	
3	Rumah Dinas Hakim	6	-	6	-	
4	Rumah Dinas Sekretaris	1	-	1	-	

No.	Jenis Kendaraan	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Mobil Toyota Altis	2008	V			
2.	Mobil Toyota Vios	2009	V			
3.	Mobil Hyundai Accent	2004		V		
4.	Mobil Toyota Innova	2009		V		
5.	Mobil Timor	2001			V	Penghapusan
6.	Mobil Toyota Fortuner	-	V			Sewa
7.	Mobil Toyota Camry	-	V			Sewa
8.	Mobil Toyota Hiace	-	V			Sewa
9.	Honda GL Pro	2006		V		
10.	Honda Kharisma	2005		V		
11.	Suzuki RC 100	1996			V	Penghapusan

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

❖ IMPLEMENTASI E-COURT

Implementasi E-Court di Tahun 2022 telah mencapai 100% yaitu sejumlah 196 Perkara dari 196 Perkara. Pencapaian ini dimulai sejak Bulan Januari 2022 sampai dengan Bulan Desember 2022. Pencapaian E-Court telah ditingkatkan di tahun ini dan tahun berikutnya akan tetap dipertahankan.

❖ IMPLEMENTASI SIPP

Implementasi SIPP untuk tahun 2022 meliputi penyelesaian 196 perkara banding yang masuk dan terdaftar melalui Aplikasi SIPP dengan sisa perkara sebanyak 14 perkara. Kesemuanya berjalan dengan baik dan lancar.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 1332 / KP.04.6 / 8 / 2022 tanggal 01 Agustus 2022 perihal : Pembentukan Tim Akreditasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, telah dilakukan berbagai tahapan-tahapan oleh Tim Akreditasi untuk memperoleh predikat dimaksud.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan hingga diperolehnya predikat A (Exellent) bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Persiapan dan pelaksanaan inventarisir eviden di masing-masing area
Kegiatan persiapan ini, dilakukan sejak tanggal 01 Agustus 2022 hingga 30 Agustus 2022 yang diikuti oleh semua kelompok kerja untuk mendata dan menginventarisir kekurangan-kekurangan eviden di masing-masing area.
2. Persiapan dan pelaksanaan audit internal
Persiapan audit internal telah dilakukan dengan dibentuknya Tim Auditor Internal oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Pelaksanaan audit internal berdasarkan kesepakatan bersama Tim Audit Internal dengan kelompok kerja masing-masing area dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022.
3. Kesimpulan dan rekomendasi oleh Tim Auditor Internal
Dari kegiatan audit internal oleh Tim Auditor Internal, maka diperoleh kesimpulan dan rekomendasi yang harus segera dipenuhi oleh kelompok kerja masing-masing area. Dari hasil temuan Tim Auditor Internal, maka sudah dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah siap untuk dilakukan assessment oleh assesor dari Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI.
4. Penilaian oleh Tim Auditor Eksternal (Assesor) dari Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI
Dari hasil penilaian oleh Tim Auditor Eksternal (Assesor) yang dilaksanakan sejak tanggal 31 Agustus s/d 02 September 2022 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI yang ditetapkan pada tanggal 02 September 2022, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh nilai "A (Exellent)".

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelaksanaan Posbakum dan Pelayanan Terpadu yang meliputi Layanan Pengaduan, Meja Informasi, dan juga E-Court corner yang masih dalam tahap pengajuan account telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Sarana dan Prasarana telah tersedia dengan baik serta petugas pelayanan terpadu yang dilaksanakan dengan sistem piket bergiliran setiap minggu dibawah koordinator kepaniteraan hukum dan kepaniteraan perkara. Pelaksana piket layanan

dilaksanakan oleh Panitera Pengganti dan staf yang ditunjuk dibantu oleh beberapa orang tenaga honorer sebagai asisten umum.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Saat ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengembangkan fitur aplikasi berbasis web dalam pengelolaan tata persuratan untuk menunjang kelancaran dalam distribusi dan tindak lanjut baik surat masuk maupun surat keluar.

Aplikasi **MasBro** (Manajemen Surat Berbasis Online) ini merupakan aplikasi berbasis web dan mobile yang menyediakan informasi bagi user / penggunanya yang dipakai untuk mempermudah manajemen agenda surat masuk dan surat keluar, membuat kartu kendali surat, membuat disposisi surat, melacak posisi surat, manajemen lainnya di dalam pengembangan secara berlanjut untuk kepentingan kantor secara menyeluruh, efektif dan efisien menyesuaikan perkembangan informasi dan teknologi.

Aplikasi **SiLoby** (Aplikasi Lobby) merupakan aplikasi berbasis intranet yang membantu memonitor keberadaan para tamu yang berkepentingan supaya bisa dimonitor oleh pimpinan, mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris untuk menjadi pengendalian internal di kantor Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam salah satu fungsi pengawasan dan pelayanan menuju wilayah bebas dari korupsi, dan sebagai wujud wilayah birokrasi bersih melayani kepada para pencari keadilan maupun pihak lainnya yang datang ke kantor.

Kedua aplikasi diatas sangat membantu untuk menunjang tugas pokok dan fungsi sehari-hari setiap sub bagian yang ada di dalam Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, sebagai wujud badan peradilan yang senantiasa menggunakan perkembangan informasi dan teknologi yang sering digaungkan oleh Mahkamah Agung RI demi pelayanan publik yang prima untuk para pencari keadilan (Yustisabelen), satuan kerja di wilayah hukum, serta mitra kerja terkait dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Salah satu fungsi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini dijalankan oleh unsur Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (Ketua dan Wakil Ketua) dibantu oleh Pejabat yang ditunjuk. Adapun yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan adalah para aparatur Pengadilan (Hakim, pejabat dan pegawai) baik yang berada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sendiri maupun yang berada di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Kegiatan pembinaan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan. Secara formalnya, dilakukan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi.

Hakim Pengawas Bidang yang merupakan kepanjangan tangan Ketua Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dalam melakukan pengawasan internal di setiap bidang dan bagian telah dilaksanakan dengan baik berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/793/KP.04.6/5/2022 tertanggal 19 Mei 2022.

A. EVALUASI

Kegiatan pengawasan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan, yang untuk hal-hal tertentu didelegasikan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Secara formalnya, hasil pengawasan oleh Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, disampaikan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (pimpinan, hakim tinggi, pejabat dan pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi.

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka kegiatan pengawasan di daerah / Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah :

1. Evaluasi penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan baik Teknis maupun Non Teknis, dengan berpedoman pada Buku IV tentang Pengawasan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI;
2. Evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah disampaikan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada waktu kegiatan pembinaan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

3. Melakukan peneguran-peneguran dan atau pemeriksaan terhadap hal-hal yang perlu dilakukan peneguran / pemeriksaan oleh Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
4. Melakukan tindakan-tindakan lain selain sebagaimana tersebut diatas, atas perintah Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Untuk Tahun Anggaran 2022 ini, Pembinaan oleh Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ke seluruh satuan kerja di daerah dan Pengawasan Kesekretariatan maupun Kepaniteraan oleh Hakim Pengawas Daerah telah dilaksanakan dengan baik. Adapun rincian kegiatannya adalah sebagai berikut :

Pembinaan :

1. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/613/PS.03/4/2022 tanggal 08 April 2022 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 April 2022;
2. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/613/PS.03/4/2022 tanggal 08 April 2022 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 20 s/d 22 April 2022;
3. Berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/601/PS.03/4/2022 tanggal 8 April 2022 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**, yang dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 April 2022;
4. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/764/PS.03/5/2022 tanggal 12 Mei 2022 telah dilaksanakan pembinaan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**, yang dilaksanakan pada tanggal 23 s/d 25 Mei 2022;

Pengawasan Bidang Kepaniteraan :

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/799/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**, yang dilaksanakan pada tanggal 8 s/d 10 Juni 2022;
2. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/800/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2022;
3. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/803/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 s/d 01 Juli 2022;
4. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/801/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, yang dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 8 Juli 2022;
5. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/802/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Juli 2022;

6. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/804/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**, yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni s/d 15 Juni 2022;

Pengawasan Bidang Kesekretariatan :

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/816/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**, yang dilaksanakan pada tanggal 08 s/d 10 Juni 2022;
2. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/814/PS.04/6/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**, yang dilaksanakan pada tanggal 13 s/d 15 Juni 2022;
3. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/815/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**, yang dilaksanakan pada tanggal 22 s/d 24 Juni 2022;
4. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1019/PS.04/6/2022 tanggal 28 Juni 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni s/d 1 Juli 2022;
5. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/811/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, yang dilaksanakan pada tanggal 07 s/d 08 Juli 2022;
6. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/812/PS.04/5/2022 tanggal 27 Mei 2022 telah dilaksanakan pengawasan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 14 Juli 2022;

BAB VII P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang ada dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022 ini, dapatlah diambil kesimpulan bahwa secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selama tahun anggaran 2022 telah dapat berjalan dengan baik.

Dari pemaparan seluruh kegiatan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2022 ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tupoksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas Teknis Yuridis, meliputi :
 - 1) Sebagai Pengadilan Tingkat Banding;
 - 2) Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
 - 3) Sebagai Pengadilan yang memutus sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
 - b. Tugas Administrasi, meliputi :
 - 1) Pelaksanaan administrasi persidangan;
 - 2) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan;
 - 3) Pelaksanaan administrasi umum dan pembangunan;
 - c. Tugas Pengawasan, meliputi :
 - 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas (pengawasan melekat dan pengawasan fungsional);
 - 2) Pengawasan terhadap aparatur pengadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. Tugas Pelayanan Masyarakat, meliputi :
 - 1) Pelayanan prima terhadap masyarakat;
 - 2) Pelayanan prima terhadap internal pengadilan;
 - 3) Pelayanan prima instansi atasan dan atau instansi lain / pemangku kepentingan lainnya;
 - e. Tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar jelas arah dan sasaran organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menyusun Rencana Strategi 2020 – 2024 dengan memperhatikan dan menganalisa lingkungan eksternal dan lingkungan internal pengadilan sehingga diperoleh key success factor (faktor-faktor yang dapat mensukseskan dalam pencapaian sasaran) dan

- juga diperoleh faktor-faktor penghambat dalam mencapai sasaran untuk dipakai di dalam merumuskan strategi-strategi dalam mencapai sasaran organisasi;
3. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah relative sedikit, sehingga beban kerja Majelis Hakim dan pejabat fungsional pengadilan lainnya dalam menangani perkara juga relative ringan;
 4. Penyelesaian perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu tidak melebihi 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima hingga diputusnya perkara-perkara tersebut;
 5. Promosi, Mutasi dan Pensiun bagi aparatur dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah terlaksana dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah melalui analisa dan evaluasi dari Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
 6. Pengelolaan Keuangan baik yang bersumber dari dana APBN dan pengelolaan keuangan perkara telah dilaksanakan dengan baik, yang tercermin dengan adanya realisasi, pembukuan dan laporan keuangan yang tersaji dari Januari hingga Desember 2022;
 7. Pengelolaan Sarana Prasarana telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari kegiatan pengadaan, pemeliharaan, penghapusan dan laporan kondisi sarana dan prasarana yang tersaji dan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. Implementasi E-Court di Tahun 2022 telah mencapai 100% yaitu sejumlah 196 Perkara dari 196 Perkara;
 9. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah mendapat predikat "A (Excellent)" dalam penilaian akreditasi penjaminan mutu;
 10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), secara sarana dan prasarana baik fisik maupun SDM sudah terpenuhi dengan baik;
 11. Inovasi unggulan untuk saat ini adalah aplikasi **SiLobby** (Aplikasi Lobby) dan **MasBro** (Manajemen Surat Berbasis Online);
 12. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan ke satker daerah dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap personil Pengadilan baik teknis maupun non teknis dengan sistem pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, guna dihasilkan tenaga yang terampil secara teknis, organisatoris dan profesional di bidangnya;
2. Kebutuhan sarana dan prasarana baik gedung maupun fasilitas gedung mohon untuk dipenuhi dengan menggunakan skala prioritas sesuai dengan dana yang tersedia, sebagai sarana penunjang kinerja dalam pelaksanaan tupoksi;
3. Peningkatan kualitas kegiatan Pembinaan dan Pengawasan baik dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;

4. Kekurangan pegawai, terutama untuk staf golongan I dan II, mohon juga segera dipenuhi, khususnya bagi satker-satker yang sangat minim tenaga stafnya;
5. Usulan mutasi / promosi / pensiun yang belum terealisasi, mohon ditindaklanjuti dengan segera apakah disetujui atau ditolak, agar adanya kepastian dalam pembinaan kepegawaian selanjutnya;

Surabaya, 20 Januari 2023
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



DR. ISTIWI BOWO, SH.MH.
NIP. 19571011 198503 1 001